



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2018



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2019**


KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Denpasar, 21 Januari 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

Drs. I Komang Sugiarta, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 199003 1 1262

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 2 |
| 1.3 Isu Strategis..... | 3 |
| 1.4 Struktur Organisasi | 4 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 8 |
| 2.1 Rencana Strategis | 8 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018..... | 11 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 15 |
| 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja..... | 15 |
| 3.2 Pengukuran Kinerja..... | 16 |
| 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 16 |
| BAB IV PENUTUP | 30 |
| LAMPIRAN | |
| LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA (PK) | |
| LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA | |
| LAMPIRAN 3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) | |
| LAMPIRAN 4 RENCANA AKSI BADAN KESBANGPOL | |
| LAMPIRAN 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | |

IKHTIAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan salah satu unsur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian – capaian kinerja dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Di dalamnya memuat penilaian terhadap unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian kinerja.

Adapun mekanisme penyusunan laporan kinerja meliputi analisa terhadap sinergitas antara pencapaian kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan tujuan serta sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan evaluasi juga terhadap perkembangan capaian tujuan dan sasaran dengan menggunakan informasi atau data – data yang diperoleh secara lengkap.

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada Tahun 2018. Indikator Kinerja Utama merupakan outcome dari program – program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan sebagai dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Persentase menurunnya kasus-kasus sosial;
2. Persentase menurunnya kasus-kasus SARA;
3. Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan;
4. Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat;
5. Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan beberapa program antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah menjadi PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2018 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar memiliki tugas dan fungsi membantu Walikota Denpasar dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2018 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang - Undang Nomor1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang - Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021.

1.3 Isu Strategis

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang aman, nyaman, dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Denpasar merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yaitu mengantisipasi berbagai kerawanan sosial, politik yang berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memiliki visi sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman, nyaman dan tenteram dalam menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya.

Upaya kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Aspek wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandang sikap, penghayatan dan perilaku seluruh warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek Politik, yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk memperkuat keberadaan NKRI, dengan mengembangkan sistem praktik nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju bersatu, demokratis, adil dan makmur. Kota Denpasar merupakan kota yang terbuka, sehingga banyaknya penduduk mendatang dan mobilitas penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban di perkotaan sebagian besar diakibatkan oleh adanya ketidakdisiplinan warga kota terhadap tatanan kehidupan seperti administrasi kependudukan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap tata ruang, pelanggaran dalam bidang bangunan, tempat usaha maupun yang lainnya sehingga menimbulkan kesembrautan kota. Adapun isu strategis di bidang pelayanan keamanan dan ketertiban kota antara lain :

1. Peningkatan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga untuk dapat beraktivitas;

2. Peningkatan jaminan rasa aman dengan memperluas partisipasi semua pihak untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban umum;
3. Peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, Desa Pekraman, Pecalang, dan semua stakeholder yang terkait dalam mengatasi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

1.4 Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Denpasar. Pelaksanaan tugas sehari-hari, dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang membawahi 8 (delapan) Sub Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
3. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
 - Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - Sub Bidang Penanganan Konflik
 - Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis
5. Bidang Politik Dalam Negeri
 - Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu
 - Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
 - Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

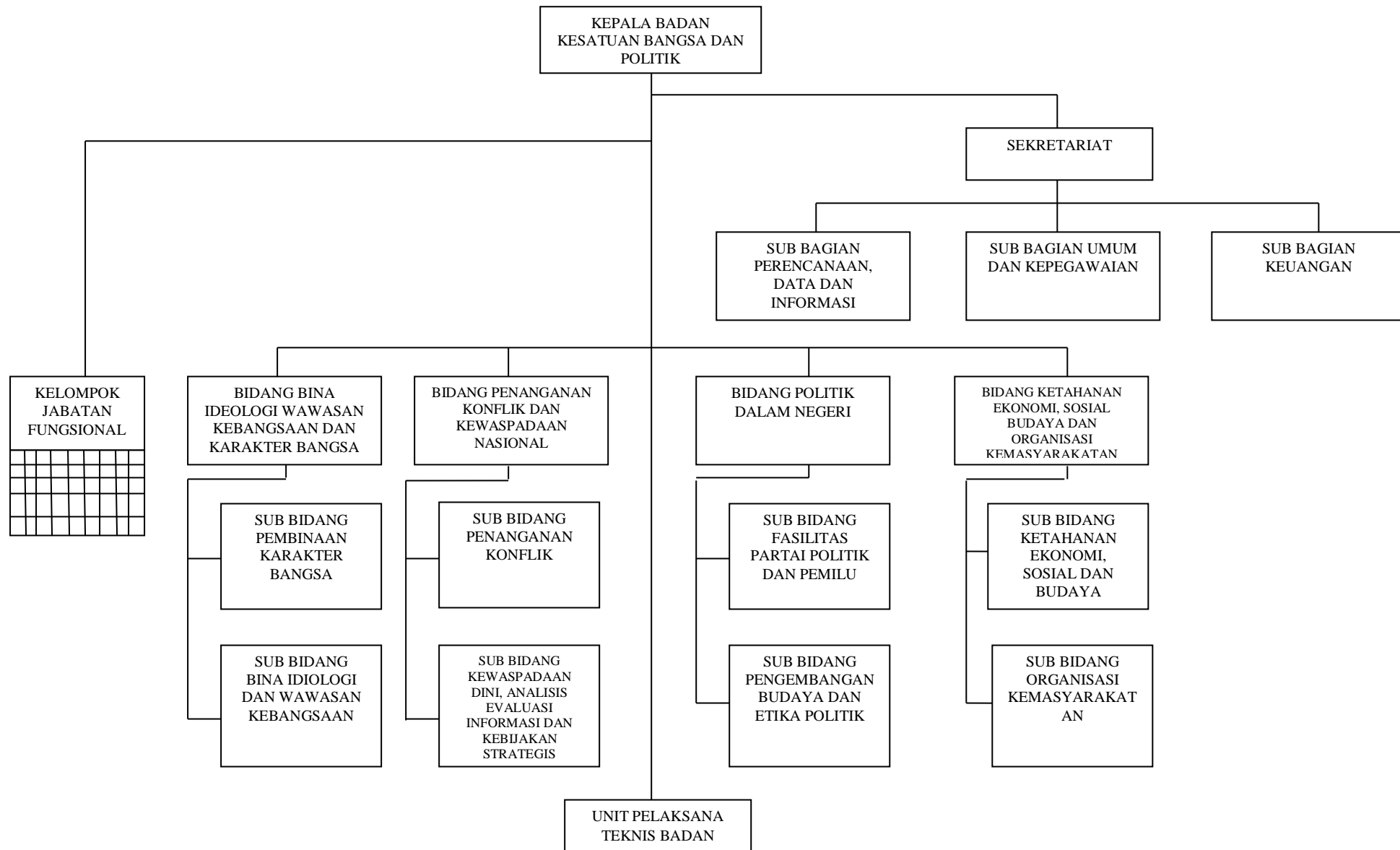
2. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan fasilitas peningkatan sumber daya manusia Badan Kesbangpol;
- b. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



1.5 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar selama tahun 2018. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kota Denpasar. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, isu strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) tahun 2018.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2018.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
4. Rencana Aksi Tahun 2018
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar melalui berbagai kegiatan tahunan.

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 adalah ***“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”*** penjabaran lebih konkrit visi pembangunan dimaksud Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali;
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal;
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*);
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan;
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.

Mengacu pada Visi Pembangunan dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2016–2021, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan Kota Denpasar melalui program – program yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulan. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|---|--|--|------|------|--------|--------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Menguatnya jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali | Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% |
| | | | Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% |
| | | | Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan | 40% | 60% | 60% | 66,67% | 83,33% |
| | | | Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% |
| | | | Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% |

2.1.2 Program Kegiatan

Rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Adapun program dan kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2018 ditunjukan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2
Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018

| No | Program | Kegiatan |
|----|--|---|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | a. Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | a. Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 4 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi WNA b. Pengamanan Kawasan Sanur c. Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar d. Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kota Denpasar e. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) f. Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar g. Monitoring/Pemantauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar h. Pelatihan Pecalang Guna Pengendalian, Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar |
| 5 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa |

| No | Program | Kegiatan |
|----|---|---|
| | | c. Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan |
| | | d. Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan |
| 6 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | a. Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) |
| 7 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | a. Verifikasi Bantuan Parpol |
| | | b. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik |
| | | c. Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar |
| | | d. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar |
| | | e. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara Intensif kepada Seluruh Stakeholder |

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dengan telah diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah dengan PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2018 memuat informasi tentang target sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Disamping itu dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kota Denpasar untuk Tahun 2018, secara rinci dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.2**Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dan Target Kinerja Tahun 2018**

Tugas Pokok : 1 Badan Kesbangpol Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2 Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik.

| NO | KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA | PENANGGUNGJAWAB | SUMBER DATA | TARGET |
|----|---|--|---|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | 1 Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | Jumlah kasus sosial yang ada dibagi target kasus sosial tiap tahun X 100% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar | Laporan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional | 70% |
| | | 2 Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | Jumlah kasus SARA yang ada dibagi target kasus SARA tiap tahun X 100% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar | Laporan Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | 70% |

| NO | KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA | PENANGGUNGJAWAB | SUMBER DATA | TARGET |
|----|---|--|---|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3 Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan | Jumlah partisipasi organisasi kemasyarakatan dibagi target partisipasi organisasi kemasyarakatan X 100% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar | Laporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan | 60% |
| | | 4 Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | Jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada dibagi target kasus penyakit masyarakat tiap tahun X 100% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar | Laporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan | 70% |
| | | 5 Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik | Jumlah yang terdidik dibagi jumlah pemilih X 100% | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar | Laporan Bidang Politik Dalam Negeri | 70% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2018, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam urusan pelaksanaan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik secara umum dapat dikatakan baik. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh besaran target atas indikator sasaran telah mencapai 100 persen.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2018

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realiasi | Capaian |
|---|--|---------------|-----------------|----------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | 70% | 70% | 100% |
| | Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | 70% | 70% | 100% |
| | Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan | 60% | 60% | 100% |
| | Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | 70% | 70% | 100% |
| | Persentase meningkatnya partisipasi | 70% | 70% | 100% |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realiasi | Capaian |
|---------|-------------------------------------|--------|----------|---------|
| | masyarakat dalam pendidikan politik | | | |

3.2 Pengukuran Kinerja

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 (Data Terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2018 dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut.

Sasaran: Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel, capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Tabel Capaian Sasaran

| Indikator Kinerja Utama | Target 2018 | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | % Capaian Tahun 2018 |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | 70% | 60% | 70% | 100% |

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Sosial s/d Akhir Periode Renstra

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi 2018 | Tingkat kemajuan % |
|---|--|----------------------|----------------|--------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | 95% | 70% | 73,68% |

Tabel 3.4
Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Sosial

| Sasaran | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2018 | Realisasi Anggaran | Persentase Realisasi |
|---|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | Rp 1.972.268.500 | Rp 1.806.502.005 | 91,59% |

Tabel 3.5
Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Sosial

| Sasaran | Indikator Kinerja | Kinerja 2018 | | | Anggaran 2018 | | |
|---|--|--------------|----------|---------|------------------|------------------|---------|
| | | Target | Realiasi | Capaian | Alokasi | Realisasi | Capaian |
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | 70% | 70% | 100% | Rp 1.972.268.500 | Rp 1.806.502.005 | 91,59% |

Tabel 3.6
Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator Persentase
Menurunnya Kasus – Kasus Sosial

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | 100% | 91,59% | 8,41% |

Tabel 3.7
Tabel Capaian Sasaran

| Indikator Kinerja Utama | Target 2018 | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | % Capaian Tahun 2018 |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | 70% | 60% | 70% | 100% |

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Menurunnya Kasus-Kasus
SARA s/d Akhir Periode Renstra

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi 2018 | Tingkat kemajuan % |
|---|--|----------------------|----------------|--------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | 95% | 70% | 73,68% |

Tabel 3.9
Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase Menurunnya Kasus – Kasus SARA

| Sasaran | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2018 | Realisasi Anggaran | Persentase Realisasi |
|---|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | Rp 4.039.668.864 | Rp 3.474.255.579 | 86,00% |

Tabel 3.10
Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus SARA

| Sasaran | Indikator Kinerja | Kinerja 2018 | | | Anggaran 2018 | | |
|---|--|--------------|----------|---------|------------------|------------------|---------|
| | | Target | Realiasi | Capaian | Alokasi | Realisasi | Capaian |
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | 70% | 70% | 100% | Rp 4.039.668.864 | Rp 3.474.255.579 | 86,00% |

Tabel 3.11
Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator Persentase
Menurunnya Kasus – Kasus SARA

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | 100% | 86,00% | 14,00% |

Tabel 3.12
Tabel Capaian Sasaran

| Indikator Kinerja Utama | Target 2018 | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | % Capaian Tahun 2018 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | 70% | 60% | 70% | 100% |

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus
Penyakit Masyarakat s/d Akhir Periode Renstra

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi 2018 | Tingkat kemajuan % |
|---|---|----------------------|----------------|--------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | 95% | 70% | 73,68% |

Tabel 3.14
Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Penyakit Masyarakat

| Sasaran | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2018 | Realisasi Anggaran | Persentase Realisasi |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | Rp 48.830.875 | Rp 47.680.875 | 97,64% |

Tabel 3.15
Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase Menurunnya Kasus – Kasus Penyakit Masyarakat

| Sasaran | Indikator Kinerja | Kinerja 2018 | | | Anggaran 2018 | | |
|---|---|--------------|----------|---------|---------------|---------------|---------|
| | | Target | Realiasi | Capaian | Alokasi | Realisasi | Capaian |
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | 70% | 70% | 100% | Rp 48.830.875 | Rp 47.680.875 | 97,64% |

Tabel 3.16
Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator Persentase
Menurunnya Kasus – Kasus Penyakit Masyarakat

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | 100% | 97,64% | 2,36% |

Tabel 3.17
Tabel Capaian Sasaran

| Indikator Kinerja Utama | Target 2018 | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | % Capaian Tahun 2018 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4. Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik | 70% | 60% | 70% | 100% |

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam Pendidikan Politik s/d Akhir Periode Renstra

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi 2018 | Tingkat kemajuan % |
|---|---|----------------------|----------------|--------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik | 95% | 70% | 73,68% |

Tabel 3.19
Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik

| Sasaran | Indikator Kinerja | Anggaran Tahun 2018 | Realisasi Anggaran | Persentase Realisasi |
|---|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik | Rp 222.882.775 | Rp 196.726.545 | 88,26% |

Tabel 3.20
Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik

| Sasaran | Indikator Kinerja | Kinerja 2018 | | | Anggaran 2018 | | |
|---|---|--------------|----------|---------|----------------|----------------|---------|
| | | Target | Realiasi | Capaian | Alokasi | Realisasi | Capaian |
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik | 70% | 70% | 100% | Rp 222.882.775 | Rp 196.726.545 | 88,26% |

Tabel 3.21
Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator Persentase
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik | 100% | 88,26% | 11,74% |

3.3.1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa capaian kinerja mengalami keberhasilan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain.

- a. Komunikasi dan koordinasi antar stakeholder yang ada dapat berjalan dengan baik dan lancar;
- b. Partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan sudah meningkat;
- c. Kemampuan SDM yang dilibatkan dalam menjalani kegiatan – kegiatan yang direncanakan sudah semakin meningkat.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar akan melakukan langkah – langkah sebagai berikut.

- a. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan;
- b. Komunikasi dan koordinasi antar pemegang puncak pimpinan perlu ditingkatkan sehingga gangguan dari kebijakan politik dapat ditekan sekecil-kecilnya;
- c. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
- d. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan.

3.3.2 Cost Per Outcome (Perjanjian Kinerja dan Anggaran)

Secara umum realisasi pencapaian kinerja dan anggaran yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada tahun 2018 telah berjalan efektif dan efisien. Untuk indikator kinerja tingkat efisiensi mencapai 2% hingga 14%. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mencapai target kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar telah efisien dalam memanfaatkan sumber anggaran. Untuk informasi selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.22
Cost per Outcome (Perjanjian Kinerja dan Anggaran)

| Sasaran | Indikator Kinerja | Kinerja 2018 | | | Anggaran 2018 | | |
|---|---|--------------|----------|---------|------------------|------------------|---------|
| | | Target | Realiasi | Capaian | Alokasi | Realiasi | Capaian |
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | 70% | 70% | 100% | Rp 1.972.268.500 | Rp 1.806.502.005 | 91,59% |
| | Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | 70% | 70% | 100% | Rp 4.039.668.864 | Rp 3.474.255.579 | 86,00% |
| | Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | 70% | 70% | 100% | Rp 48.830.875 | Rp 47.680.875 | 97,64% |
| | Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik | 70% | 70% | 100% | Rp 222.882.775 | Rp 196.726.545 | 88,26% |

Cost per Outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk masing – masing indikator kinerja yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018

| Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | 100% | 91,59% | 8,41% |
| | Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | 100% | 86,00% | 14,00% |
| | Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | 100% | 97,64% | 2,36% |
| | Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik | 100% | 88,26% | 11,74% |

3.3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tahun 2018 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN | TARGET ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % |
|---|--|--|------------------------|---------------------------|----------|
| Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Persentase menurunnya kasus-kasus sosial | Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA | Rp 55.682.000 | Rp 55.682.000 | 100,00 |
| | | Pengamanan Kawasan Sanur | Rp148.080.000 | Rp146.779.105 | 99,12 |
| | | Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar | Rp212.242.000 | Rp170.777.000 | 80,46 |
| | | Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kota Denpasar | Rp630.362.000 | Rp566.520.400 | 89,87 |
| | | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | Rp374.943.000 | Rp359.494.700 | 95,88 |
| | | Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar | Rp 26.706.000 | Rp 18.693.000 | 69,99 |
| | | Monitoring/Pantauan Ormas Guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar | Rp 52.793.200 | Rp 48.629.600 | 92,11 |
| | | Pelatihan Pecalang Guna Pengendalian, Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar | Rp471.460.300 | Rp439.926.200 | 93,31 |
| | Persentase menurunnya kasus-kasus SARA | Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama | Rp543.817.550 | Rp467.928.850 | 86,04 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN | TARGET ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % |
|-------------------|---|---|------------------|--------------------|--------|
| | | Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Bangsa | Rp 2.946.873.460 | Rp 2.569.106.410 | 87,18 |
| | | Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan | Rp440.362.904 | Rp342.880.624 | 77,86 |
| | | Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan | Rp108.614.950 | Rp 94.339.695 | 86,85 |
| | Persentase menurunnya kasus-kasus penyakit masyarakat | Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | Rp 48.830.875 | Rp 47.680.875 | 97,64 |
| | Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik | Verifikasi Bantuan Parpol | Rp 41.394.800 | Rp 32.001.470 | 77,30 |
| | | Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik | Rp 37.375.350 | Rp 37.375.350 | 100,00 |
| | | Monitoring/Pantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar | Rp 30.841.000 | Rp 19.741.000 | 64,01 |
| | | Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar | Rp 45.242.675 | Rp 45.242.675 | 100,00 |
| | | Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan | Rp 68.028.950 | Rp 62.366.050 | 91,67 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KEGIATAN | TARGET ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % |
|-------------------|-------------------|---|-----------------|--------------------|---|
| | | Umum Secara Intensif Kepada Seluruh Stakeholder | | | |

BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada Tahun 2018 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016 – 2021. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016 – 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sasarnya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam pencapaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2018 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 21 Januari 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,



Drs. I Komang Sugiarta, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 199003 1 1262